



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Hasanudin No.110 B Salatiga Kode Pos 50721 Telp.(0298)326063
Faks.(0298)314206 Situs <http://dp3appkb.salatiga.go.id>
Surat Elektronik dp3appkb@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SALATIGA
NOMOR : 900.1.15/008

TENTANG
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN BENDAHARA
KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 secara tertib administrasi dan bertanggung jawab telah ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga;
13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900.1.3/407/2023 tentang Pejabat/Penjabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang meliputi:
 - 1) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - 3) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi:
 - 1) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - 2) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
2. Bendahara Kegiatan:
 - a. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. Membuat dokumen pengelolaan keuangan kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku yang mencakup buku panjar dan buku kendali;
 - c. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan/sub kegiatan menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
 - d. Mencatat pembukuan atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SALATIGA
SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN



YUNI AMBARWATI

Tembusan:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Inspektur Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PELINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA SALATIGA
 NOMOR : 900.1.15/008
 TANGGAL : 3 Januari 2025

DATA PERSONIL PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN BENDAHARA KEGIATAN
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KOTA SALATIGA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PPTK	BENDAHARA KEGIATAN
1	2		3	4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Yulia astri Mahareni, S.Kom
	2.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	1)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Tri Pangestu Aji, A.Md.T.
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	1)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Ananda Galuh Kusuma Putri, S.Sos.
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Tri Pangestu Aji, A.Md.T.
	2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Ananda Galuh Kusuma Putri, S.Sos.
	3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Ananda Galuh Kusuma Putri, S.Sos.
	4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Ananda Galuh Kusuma Putri, S.Sos.
	5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Indah Widya Rahayuningtyas, A.Md.Keb
	6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Ananda Galuh Kusuma Putri, S.Sos.

NO.	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PPTK	BENDAHARA KEGIATAN
1	2		3	4
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Tri Pangestu Aji, A.Md.T.
	2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Tri Pangestu Aji, A.Md.T.
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Indah Widya Rahayuningtyas, A.Md.Keb
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Ananda Galuh Kusuma Putri, S.Sos.
	3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Indah Widya Rahayuningtyas, A.Md.Keb
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Indah Widya Rahayuningtyas, A.Md.Keb
	2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Indah Widya Rahayuningtyas, A.Md.Keb
	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Tri Pangestu Aji, A.Md.T.
	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Tri Pangestu Aji, A.Md.T.
	5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Tri Pangestu Aji, A.Md.T.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
II. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
	1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		
	1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Oktora Holy Susanti, S.Sos	Siti Juarti, SE
	2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	1)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Oktora Holy Susanti, S.Sos	Siti Juarti, SE
III. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
	1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
	1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Oktora Holy Susanti, S.Sos	Winarni, SE

NO.	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PPTK	BENDAHARA KEGIATAN
1	2		3	4
	2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	1)	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Oktora Holy Susanti, S.Sos	Winarni, SE
	2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Oktora Holy Susanti, S.Sos	Winarni, SE
	3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Oktora Holy Susanti, S.Sos	Winarni, SE
IV. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
	1.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1)	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Oktora Holy Susanti, S.Sos	Siti Rohmiyati
V. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
	1.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1)	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Oktora Holy Susanti, S.Sos	Siti Juarti, SE
VI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
	1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		
	1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sri Hartini, S. Pd, M. Pd	Supriyono, S. M
	2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
	1)	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sri Hartini, S. Pd, M. Pd	Supriyono, S. M
	2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sri Hartini, S. Pd, M. Pd	Supriyono, S. M
VII. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
	1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
	1)	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Sri Hartini, S. Pd, M. Pd	Tri Anita Noviana, S, psi
	2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1)	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sri Hartini, S. Pd, M. Pd	Tri Anita Noviana, S, psi
	2)	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Sri Hartini, S. Pd, M. Pd	Tri Anita Noviana, S, psi

NO.	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PPTK	BENDAHARA KEGIATAN
1	2		3	4
	3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1)	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota	Sri Hartini, S. Pd, M. Pd	Tri Anita Noviana, S, psi
	2)	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Sri Hartini, S. Pd, M. Pd	Tri Anita Noviana, S, psi
VIII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
	1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
	1)	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Sumarno, S.Ag., MM	Abednego Herdian Parmenas, S.Si
	2)	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Sumarno, S.Ag., MM	Edy Prasetyo, S.Kom
	3)	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Sumarno, S.Ag., MM	Edy Prasetyo, S.Kom
	4)	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Sumarno, S.Ag., MM	Widyaningtyas Normawati, SST
	2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
	1)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Sumarno, S.Ag., MM	Yulia astri Mahareni, S.Kom
	2)	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Sumarno, S.Ag., MM	Abednego Herdian Parmenas, S.Si
	3)	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sumarno, S.Ag., MM	Edy Prasetyo, S.Kom
IX. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
	1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	1)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Sumarno, S.Ag., MM	Edy Prasetyo, S.Kom
	2)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	drg. Yulia Kristyany	Wahyu Setyaningsih
	3)	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Sumarno, S.Ag., MM	Widyaningtyas Normawati, SST
	4)	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	drg. Yulia Kristyany	Wahyu Setyaningsih

NO.	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PPTK	BENDAHARA KEGIATAN
1	2	3	4
2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
	1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	drg. Yulia Kristyany	Wahyu Setyaningsih
3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
	1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Sugiharta, S.Ag., S.Sos., MMP	Indah Widya Rahayuningtyas, A.Md.Keb
	2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	drg. Yulia Kristyany	Jarmi, SE
	3) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	drg. Yulia Kristyany	Jarmi, SE
	4) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	drg. Yulia Kristyany	Jarmi, SE
	5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	drg. Yulia Kristyany	Jarmi, SE
	6) Peningkatan Kesertaan KB Pria	drg. Yulia Kristyany	Jarmi, SE
4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
	1) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Sumarno, S.Ag., MM	Widyaningtyas Normawati, SST
X.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	1) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	drg. Yulia Kristyany	Wahyu Setyaningsih
	2) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	drg. Yulia Kristyany	Wahyu Setyaningsih
	3) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	drg. Yulia Kristyany	Wahyu Setyaningsih
	4) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	drg. Yulia Kristyany	Wahyu Setyaningsih

NO.	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PPTK	BENDAHARA KEGIATAN
1	2	3	4
2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
1)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	drg. Yulia Kristyany	Ahmad Giri Nugroho, SH
2)	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	drg. Yulia Kristyany	Wahyu Setyaningsih
3)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	drg. Yulia Kristyany	Jarmi, SE
4)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	drg. Yulia Kristyany	Jarmi, SE

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SALATIGA
SELAKU

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN



YUNI AMBARWATI